

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Proses pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia baik secara materiil maupun spirituil. Untuk melaksanakan proses pembangunan ini, dibutuhkan kerjasama yang bersinergi antara pemerintah dan rakyat. Sejak jaman nenek moyang kita hingga sekarang ini, Indonesia di kenal banyak memiliki berbagai potensi sumber daya alam, namun pada kenyataannya tujuan pembangunan masih jauh dari cita-cita yang telah dicanangkan. Meskipun jumlah penduduk Indonesia cukup besar dengan pertumbuhan yang relatif tinggi yang sering di anggap sebagai modal dasar yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan, namun realitasnya karena kurang tepat di dalam pemberdayaannya justru sering di tuding sebagai faktor penghambat upaya-upaya pembangunan di Indonesia.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan penambahan jumlah tenaga kerja yang cepat, sedang di sisi lain kemampuan Indonesia sebagai negara sedang berkembang (NSB) dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan adanya berbagai dualisme ekonomi serta perbedaan sarana prasarana yang di miliki antara desa-kota menyebabkan kesenjangan hasil-hasil pembangunan (Soegijoko 1997).

Distribusi pendapatan serta kesempatan kerja dan berusaha yang tidak merata dimungkinkan sebagai penyebab munculnya masalah kemiskinan baik di

wilayah perkotaan (urban) maupun pedesaan (rural). Perbedaan tingkat kebutuhan pokok di wilayah pedesaan dan perkotaan akan menyebabkan tekanan kemiskinan pula (*Ichimura, 1989*).

Kelompok Neo-Marxist (*Artwood dalam Firdausy, 1993*) berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung menyebabkan melebarnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi menyebabkan peningkatan konsentrasi penguasaan sumber daya dan kapital oleh para penguasa modal dan elite masyarakat. Sebaliknya, non-pemilik modal dan buruh tani akan tetap berada dalam kemiskinan dan sengsara. Kebanyakan dari mereka berada di daerah rural maupun sub urban, yang menjadikan sebagian wilayah-wilayah tersebut tertinggal baik pembangunan wilayahnya maupun sumber daya manusianya.

Tujuan pembanguran ekonomi suatu wilayah, meliputi *pertama*, mendorong terciptanya pekerjaan yang berkualitas bagi penduduk yaitu mengupayakan peningkatan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sehingga mampu berperan dalam aktivitas yang lebih produktif dan *kedua*, menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pengembang aktivitas ekonomi wilayah (*Blakely dalam Hari Murti, 2002:25*).

Sarana dan prasarana adalah dua hal yang perlu disediakan, karena ini akan membantu meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut merupakan syarat utama untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Tidak hanya itu saja, tetapi

kebijakan-kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik lokal.

Pembangunan desa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan GBHN, menyebutkan bahwa pembangunan desa diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan (GBHN, 1988), tidak disangkal telah menempatkan negara dalam kedudukan yang sentral untuk berperan didalamnya. Ini mengandung pengertian, bahwa negara memiliki peran yang nyata sebagai pencipta, perencana dan pelaksana pembangunan pedesaan. Sementara masyarakat pedesaan tetap sebagai konsumen pembangunan. Disebutkan pula dalam UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, bahwa peranan negara dalam proses pembangunan dapat dikatakan sebagai satu-satunya patron pembangunan pedesaan bagi rakyat pedesaan.

Kebutuhan akan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan dikondisikan oleh beberapa hal; pertama, banyak program berkaitan langsung dengan kesediaan rakyat untuk melaksanakan program. Kedua, bantuan pemerintahan, melalui berbagai kebijakan subsidi, pemberian fasilitas dan proteksi, ternyata malah menciptakan situasi ketergantungan. Ketiga, peranan yang meluas itu diwujudkan dengan pembentukan lembaga-lembaga yang dirasakan mendesak peran serta masyarakat.

Beberapa realita yang belum kondusif bagi terciptanya pembangunan

diantaranya dapat dikemukakan : terbatasnya tingkat partisipasi warga masyarakat yang hanya bersifat penerapan keputusan, lemahnya kemampuan artikulasi kepentingan warga masyarakat, serta adanya ketergantungan masyarakat desa yang ditandai oleh lemahnya pembaharuan endogen yang dapat mendorong ke arah sosial ekonomi yang mandiri.

Dalam penelitian tentang perubahan sistim di negara-negara sedang membangun dan transisi, Gray dalam Hari Murti (2002:26) menyoroti peranan lembaga masyarakat yang begitu besar dalam mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan. Pada penelitian yang dilakukannya tersebut ternyata aktivitas lembaga dana sosial cukup besar kiprahnya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat lokal melalui stimulan yang diberikannya.

Ketimpangan dan keterbelakangan erat kaitannya dengan sumber daya alam, ketimpangan alokasi atau penyebaran investasi, tingkat produktivitas per kapita, kualitas tenaga kerja dan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi (*economics resources*) dan organisasi sosial.

Borts dan Richardson (*Socgijoko dalam Hari Murti, 2002*) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah/dacrah berhubungan erat dengan tiga faktor penting yaitu tenaga kerja, modal dan kemajuan tehnologi. Ketersediaan ketiga faktor tersebut akan menyebabkan perbedaan intensitas pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu ketiga faktor tersebut perlu di kelola sebaik-baiknya, agar hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dinikmati dan dimanfaatkan secara optimal. Perpindahan faktor produksi khususnya faktor

bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah, karena hal tersebut secara otomatis akan menghilangkan perbedaan harga yang terjadi antar wilayah, sehingga pada akhirnya akan terjadi keseragaman pendapatan perkapita.

Sesuai dengan karakteristiknya, daerah pedesaan tidak hanya ditandai oleh keadaannya yang serba terbelakang, ia juga menanggung beban untuk mempekerjakan mayoritas angkatan kerja Indonesia yang mayoritas hanya berpendidikan SD atau kurang, menampung penganggur tidak kentara, serta menghidupi sebisanya lapisan yang berada di bawah garis kemiskinan. Pembangunan pedesaan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Namun demikian, karena sebagian besar aktor utama pembangunan berkedudukan di perkotaan, mereka cenderung lebih mengutamakan pembangunan perkotaan daripada pedesaan. Artinya, pembangunan perkotaanlah yang utama, sedangkan pembangunan pedesaan bersifat menunjang pembangunan perkotaan.

Sehubungan dengan pembangunan perkotaan Repelita antara lain menggariskan bahwa pembangunan perkotaan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan secara terencana dan terpadu. Sedangkan di pihak lain, pembangunan pedesaan lebih banyak diserahkan pada prakarsa dan swadaya masyarakat desa sendiri. Anehnya, diluar pembangunan (masyarakat) desa, terdapat bagian lain dari Repelita yang secara khusus membahas penataan agraria. Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan pedesaan dipisahkan dari pembangunan pertanian, hal itu memperkuat dugaan betapa pelaksanaan pembangunan pedesaan hanya

Namun demikian, penekanan pembangunan pedesaan pada pembangunan masyarakat secara tidak langsung merupakan pengakuan terhadap keterbelakangan masyarakat desa dibandingkan dengan masyarakat kota. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, keterbelakangan masyarakat desa ini tidak hanya ditandai oleh keterbelakangan pendidikan, atau karena banyaknya jumlah penganggur tidak kentara, tapi juga karena masih cukup besarnya jumlah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Walaupun perhatian utama dalam pembangunan pedesaan harus diberikan pada pembangunan pertanian, hakekat program pembangunan pedesaan pada dasarnya adalah untuk mengurangi dan menghapuskan kemiskinan (*Kasryno dan Stepanek dalam Revisi Baswir, 1999*). Dengan hakekat seperti itu, pembangunan pedesaan dapat dikatakan sebagai aspek yang sangat mendasar dalam program pembangunan nasional. Sebab kemiskinan bukanlah semata-mata persoalan tidak berharta, kurang gizi, atau tidak terdidik, lebih dari itu ia adalah persoalan harga diri dan martabat manusia. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan sejalan dengan hakekat pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Fenomena kemiskinan pedesaan, khususnya di pulau Jawa, bukanlah merupakan suatu gejala yang baru. Pada tahun 1926, penduduk pedesaan Jawa

**Tabel 1.1.**  
Penggolongan Penduduk Pedesaan Jawa, 1926

GOLONGAN	PERSENTASE
- Golongan miskin desa	62,5
- Petani miskin	19,8
- Pedagang, pengrajin, industrialisasi kecil, pegawai desa, kepala desa, guru, dan lain-lain	15,2
- Petani kaya dan tuan-tuan tanah	2,5

Sumber: *W.F. Wertheim, "Indonesia Society In Transition", s'Gravenhage, Van Hoeve, 1956, hal.96, dalam Lincoln Arsyad, Analisis Pengaruh Faktor-faktor Sosial Ekonomi terhadap Pendapatan Petani Miskin, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 1985, hal.165.*

Pada kurun waktu 1970-1976, persentase penduduk pedesaan yang berada di bawah garis kemiskinan baik di Jawa maupun di luar Jawa cenderung menurun. Di Jawa dari 61 persen (1970) turun menjadi 56 persen (1976), sedang di luar Jawa dari 45 persen (1970) turun menjadi 36 persen (1976). Lihat tabel 1.2.

**Table 1.2.**  
Perkiraan Besarnya Kemiskinan di Pedesaan Indonesia menurut Sajogyo Tahun 1970 dan 1976

Wilayah	Garis Kemiskinan dalam setara beras (kg/kapita/tahun)	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	
		1970	1976
<b>JAWA:</b>			
- Miskin	320	61	56
- Miskin sekali	240	40	34
- Paling miskin	180	21	18
<b>LUAR JAWA:</b>			
- Miskin	320	45	36
- Miskin sekali	240	28	20
- Paling miskin	180	15	9

Sumber : *R.M.Sudrum dan Anne Booth, "Income Distribution in Indonesia: Trends And Determint" 1980, dalam Lincoln Arsyad, Analisis Pengaruh Faktor-faktor Sosial Ekonomi terhadap Pendapatan Petani Miskin, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 1985, hal.166.*

Menurut data dan informasi kemiskinan tahun 2003 yang dipublikasikan oleh BPS, pada kurun waktu 2000-2003, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan lebih banyak di daerah pedesaan dari pada perkotaan. Di perkotaan jumlah penduduk miskin mencapai 436.610 jiwa pada tahun 2000 dan 303.300 jiwa pada tahun 2003, sedangkan jumlah penduduk miskin di pedesaan pada tahun 2000 sebanyak 599.190 jiwa dan menjadi 333.500 jiwa pada tahun 2003. Namun demikian, persentase penduduk miskin ini cenderung mengalami penurunan baik di perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan dari 24,58 persen (2000) turun menjadi 16,44 persen (2003) atau sekitar 8,14 persen penurunannya. Sedang di wilayah pedesaan penurunannya mencapai 20,69 persen dari 45,17 persen (2000) turun menjadi 24,48 persen (2003). Lihat tabel 1.3.

**Tabel 1.3.**  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Propinsi DIY Tahun 2000-2003

Tahun	Perkotaan (K)		Pedesaan (D)	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
2000	436,61	24,58	599,19	45,17
2001	266,77	14,56	500,83	38,65
2002	303,75	16,17	331,91	25,96
2003	303,3	16,44	333,5	24,48

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2003, Buku 1:Provinsi

Propinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah propinsi terkecil di Jawa dengan penduduk hanya 3,1 juta jiwa (2000). Pada akhir dekade enam puluhan propinsi ini dikenal sebagai propinsi "termiskin" No.3 dari bawah



karena 47% wilayahnya yaitu Kabupaten Gunung Kidul, merupakan wilayah tandus. Sebagian besar Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Bantul adalah daerah kering yang tidak berpengairan, sehingga makanan pokok penduduknya bukan beras tetapi ketela pohon yang dikeringkan yang disebut gaplek.

Keadaan tersebut diatas dipertegas lagi dengan data yang dikutip dari *KR* berkenaan dengan dana PKPS (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi) BBM (Bahan Bakar Minyak), dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul, di kecamatan Sedayu terdapat 2.674 keluarga atau sekitar 24,02 persen yang dikategorikan miskin dari 11.129 keluarga yang tersebar di 4 desa. Sesuai data dari BPS di Kabupaten Bantul terdapat 52.957 KK atau sekitar 24,52 persen dari 215.976 KK yang masuk kategori miskin. Dan untuk persentase penduduk miskin di Kecamatan Sedayu sebanyak 1,23 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Bantul. Penentuan keluarga miskin (Gakin) ini didasarkan pada perhitungan pendapatan perkapita perbulan sebesar Rp.484.740,- untuk 1 KK dengan asumsi 4 anggota keluarga.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KEDALAMAN KEMISKINAN DAERAH PEDESAAN (RURAL)” Studi Kasus di Dusun**

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar tidak mengalami perluasan dalam pembahasan. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa kedalaman kemiskinan di daerah pedesaan (rural), tepatnya di dusun Jaten dan Jurug, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, DIY.
2. Menganalisa kedalaman kemiskinan dengan data primer pendapatan, baik pendapatan pokok ataupun pendapatan sampingan guna mengetahui karakteristik kemiskinan dan keluarga miskin di daerah pedesaan.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh. Di satu sisi terdapat daerah yang maju dan di sisi lain masih terdapat daerah yang tertinggal. Masalah kemiskinan sangat menarik dikaji dari berbagai aspek, khususnya dari aspek demografi, sosial dan ekonomi. Dari uraian di atas, terlihat bahwa kemiskinan pedesaan dan bagaimana cara meningkatkan pendapatan petani miskin menjadi masalah yang penting

... ..

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan karakteristik kemiskinan dan keluarga miskin pada daerah rural khususnya di wilayah dusun Jaten dan jurug ?.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) daerah pedesaan di dusun Jaten dan Jurug Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul melalui beberapa indikator, yaitu: pendapatan perkapita keluarga, pendapatan perkapita setara beras, pekerjaan kepala keluarga, jumlah jiwa dalam keluarga dan luas tanah yang dimiliki.
2. Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dan keluarga miskin di dusun Jaten dan Jurug desa Argosari kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai latihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam masalah kemiskinan di daerah pedesaan (*rural*) serta sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi khususnya jurusan Ilmu

2. **Bagi Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini diharapkan selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pembuat kebijaksanaan (*policy-makers*) untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengurangi kemiskinan.

3. **Bagi Pihak Swasta**

Sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan bantuan materiil berupa stimulan maupun program bagi peningkatan daerah yang belum maju.

4. **Bagi Pihak Lain**

Sebagai sumber informasi untuk penelitian serupa dengan analisis yang